



KEBIJAKKAN PEMERINTAH TERHADAP UU NO. 25 TH. 1992 DAN PERMEN NO. 16 TH. 2015 TERKAIT EFEKTIVITAS KOSPIN JASA PEKALONGAN JATENG DAN KOPERASI BMT SYARIAH SIDOGIRI PASURUAN JATIM

Kusyana

STAIS Pangeran Dharma Kusuma Segeran, Indramayu, Indonesia

indramayukusyana@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56457/jjih.v2i1.110>

Disubmit: 23 April 2024

Diterima: 13 Mei 2024

Diterbitkan: 13 Mei 2024

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the performance of two major cooperatives in Indonesia, namely Kospin Jasa Pekalongan and the Syariah Cooperative BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Kospin Jasa, established in 1973, has grown significantly with assets of approximately Rp 2.5 trillion and many branch offices throughout Indonesia. This cooperative has also adopted online technology and provides ATM cards, aiming to become a world-class cooperative. Meanwhile, the Syariah Cooperative BMT UGT Sidogiri, established in 2000, has recorded significant asset growth, reaching Rp 2.2 trillion in 2016, and targets assets of Rp 5 trillion for the 2018-2020 mid-term work plan. This study uses normative legal methods with a descriptive approach to describe certain legal events and analyze the relationships between existing variables. The government supports the development of these cooperatives through various policies, including the development of the syariah economy and anticipating the enactment of the Cooperative Bill, which accommodates the principles of the syariah economy. This research shows that these cooperatives play an important role in poverty alleviation and improving community welfare and are expected to continue contributing positively to the national economy.

Keywords: Law, Cooperative, Syariah Economy, Cooperative Performance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja dua koperasi besar di Indonesia, yaitu Kospin Jasa Pekalongan dan Koperasi Syariah BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Kospin Jasa, didirikan pada tahun 1973, telah tumbuh signifikan dengan aset sekitar Rp 2,5 triliun dan banyak kantor cabang di seluruh Indonesia. Koperasi ini juga mengadopsi teknologi online dan menyediakan kartu ATM, serta menargetkan menjadi koperasi kelas dunia. Sementara itu, Koperasi Syariah BMT UGT Sidogiri, didirikan pada tahun 2000, telah mencatatkan pertumbuhan aset yang signifikan, mencapai Rp 2,2 triliun pada tahun 2016, dan menargetkan aset Rp 5 triliun untuk rencana kerja jangka menengah 2018-2020. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kejadian hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang ada. Pemerintah mendukung perkembangan koperasi ini melalui berbagai kebijakan, termasuk pengembangan ekonomi syariah danantisipasi disahkannya RUU Perkoperasian yang mengakomodir prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi-koperasi ini berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta diharapkan terus berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Kata kunci: Hukum, Koperasi, Ekonomi Syariah, Kinerja Koperasi

PENDAHULUAN

Kospin Jasa didirikan oleh pengusaha kecil dan menengah pada dekade 1970-an untuk mengatasi kesulitan dalam memperoleh pinjaman modal usaha. Didirikan pada 13 Desember 1973 di kediaman Bank H.A. Djunaid (Alm), koperasi ini menyatukan anggota dari tiga kelompok etnis: pribumi, Cina, dan Arab. Diberi nama "JASA," koperasi ini bertujuan memberikan layanan dan manfaat bagi anggotanya, gerakan koperasi, masyarakat, dan pemerintah (Ompusunggu, Sutrisno, & Hukom, 2023).

Sejak awal berdirinya, Kospin Jasa telah melibatkan semua pihak dan golongan tanpa memandang suku, ras, atau agama untuk bersatu dalam menyelesaikan masalah ekonomi bersama dalam satu wadah koperasi. Visi koperasi ini adalah menjadi koperasi simpan pinjam yang mandiri dan tangguh, berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama yang berkeadilan di Indonesia. Misinya melibatkan seluruh potensi masyarakat tanpa membedakan suku, ras, golongan, atau agama, membantu pedagang kecil dan menengah dalam mobilisasi permodalan untuk kelancaran usaha, serta aktif mengajak mitra usaha lainnya, baik BUMN, swasta, perbankan, maupun gerakan koperasi lainnya.

Logo Kospin Jasa melambangkan "pluralisme dan kebersamaan," yang digambarkan melalui inisial "J" yang dinamis dalam sebuah roda, mewakili berbagai warna dan elemen masyarakat. Struktur manajemen mencakup pembuatan kebijakan dan pengawasan operasional, dengan kegiatan sehari-hari diamanatkan kepada berbagai divisi (Taufiq, 2020).

Kospin Jasa telah tumbuh secara signifikan, mencapai aset sekitar Rp 2,5 triliun pada tahun 2012 dan terus berusaha mencapai status koperasi kelas dunia. Pada tahun 2018, koperasi ini mencatat pertumbuhan aset yang positif meskipun belum mencapai semua target keuangan akibat perlambatan ekonomi nasional dan bencana alam. Meskipun demikian, aset Kospin Jasa dalam layanan konvensional tumbuh 4,53% year-on-year (yoy) menjadi Rp 6,69 triliun, sementara layanan syariahnya mencapai Rp 1,61 triliun, meningkat 5,23% yoy. Meskipun menghadapi tantangan, koperasi ini mencapai sisa hasil usaha (SHU) yang lebih tinggi sebesar 17,8% pada tahun 2018, didorong oleh efisiensi biaya (Pasca, 2018).

Pemerintah Indonesia mendukung koperasi melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16/Per.M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Koperasi seperti Kospin Jasa juga diharapkan menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), mencerminkan peran penting mereka dalam perekonomian nasional dan upaya pengentasan kemiskinan (Pasca, 2018).

Kospin Jasa berencana membuka cabang baru di Sulawesi Selatan, Kalimantan, Palembang, dan Aceh, mengintegrasikan sistem online untuk kenyamanan anggota, dan menyediakan kartu ATM bekerja sama dengan Bank Permata. Aspirasi koperasi ini untuk masuk dalam peringkat koperasi global telah mendapat respon positif dari pejabat pemerintah, termasuk Menteri Koperasi dan UKM (Pasca, 2018).

BMT UGT Sidogiri didirikan pada tahun 2000 oleh individu-individu yang terlibat dalam urusan administratif pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur. Koperasi ini mencatat pertumbuhan aset yang signifikan, dari Rp 1,8 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 2,2 triliun pada tahun 2016, dengan omzet penjualan mencapai Rp 16,8 triliun. Pada tahun 2017, koperasi ini menargetkan mencapai aset Rp 5 triliun pada tahun 2020 (Darsono, 2022).

BMT UGT Sidogiri mengoperasikan 278 cabang di sepuluh provinsi di Indonesia, melayani 16.010 anggota dan 783.418 deposit. Koperasi ini mempekerjakan sekitar 1.500 orang, dengan prioritas pada alumni pondok pesantren Sidogiri untuk meningkatkan kepercayaan dalam komunitas. Kinerja keuangan koperasi ini meliputi penyaluran kredit ultra mikro (UMi) sebesar Rp 50 miliar kepada 11.104 anggota (Darsono, 2022).

Pada tahun 2017, BMT UGT Sidogiri menduduki peringkat keempat dalam daftar 100 koperasi terbesar di Indonesia, menerima penghargaan untuk IT terbaik, omzet terbesar, dan aset terbesar. Keberhasilannya dikaitkan dengan manajemen profesional dan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan aspirasi untuk meningkatkan statusnya menjadi koperasi primer nasional sejajar dengan Kospin Jasa (Darsono, 2022).

Pemerintah Indonesia mendukung perkembangan koperasi syariah melalui kebijakan yang mengantisipasi pengesahan RUU Perkoperasian, yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat koperasi syariah dan BMT agar dapat bersaing dengan lembaga perbankan dan entitas bisnis lainnya, serta mendorong keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Haryadi, 2020).

Koperasi konvensional menawarkan pinjaman berbasis bunga kepada anggotanya, sementara koperasi syariah menyediakan layanan berbasis bagi hasil (*bai' murabahah*) atau sewa (*ijarah*). Koperasi syariah juga terlibat dalam pengumpulan dan distribusi zakat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang bantuan dan kesejahteraan bersama (Nursaman & Sisdianto, 2020).

Koperasi konvensional fokus pada pengawasan kinerja, sedangkan koperasi syariah mengawasi kinerja dan kepatuhan syariah, memastikan transaksi keuangan sesuai dengan hukum Islam (Darsono, 2022).

Koperasi konvensional mewajibkan anggota untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya, terlepas dari hasil usaha. Sebaliknya, koperasi syariah membagi keuntungan dan kerugian dengan anggotanya, mengurangi beban finansial selama penurunan bisnis dan mendorong dukungan timbal balik (Haryadi, 2020).

Baik Kospin Jasa maupun BMT UGT Sidogiri merupakan contoh peran signifikan koperasi dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Koperasi konvensional dan syariah menyediakan layanan keuangan penting, mendorong kesejahteraan komunitas, dan berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan. Kebijakan dan dukungan pemerintah lebih lanjut meningkatkan pertumbuhan dan dampak mereka, dengan upaya berkelanjutan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam kerangka kerja koperasi nasional. Seiring perkembangan koperasi, kontribusi mereka terhadap keadilan ekonomi dan kesetaraan sosial diharapkan semakin kuat, mendorong perekonomian nasional yang lebih inklusif dan tangguh.

METHODS

Penelitian ini adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis gejala-gejala hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder, khususnya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan merumuskan kebenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat ahli atau doktrin, serta informasi hukum pendukung.

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian hukum tertentu pada waktu tertentu. Bentuk penelitiannya termasuk dalam kategori perspektif evaluatif, yang berarti memberikan gambaran atau perumusan masalah sesuai dengan fakta yang ada dan menguji hubungan antara variabel-variabel yang ada melalui analisis.

Penelitian ini diterapkan dari sudut pandang penelitian murni, yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teori saja, dan juga mencakup penelitian fokus masalah yang menyoroti isu-isu aktual yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan masalah dan gejalanya, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif karena permasalahan yang ada sebelumnya telah diketahui dan fakta-faktanya telah diinventarisasikan.

Konsep hukum dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan hukum, dengan tipe kajian ajaran hukum murni yang mengkaji "law as it is written in the books". Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal,

yang menggunakan logika deduktif untuk membangun sistem hukum positif dengan orientasi positivistic.

Konsepsi hukum yang digunakan adalah sebagai norma hukum atau peraturan hukum (law in the books), dengan pendekatan normatif (normative jurisprudence).

HASIL

1. Presiden RI Jokowi, mengatakan bahwa Koperasi beromzet triliunan yang layak dicontoh. Menurut Jokowi saat menyapa para bupati yang hadir saat silaturahmi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7/2018). Koperasi tersebut bisa membawa nama baik Indonesia, baik didalam negeri, maupun luar negeri. Pengalaman koperasi tersebut, menurutnya layak direplikasi di Indonesia. Jokowi menyatakannya pada saat Hari Koperasi Nasional ke-71 di ICE, BSD, tanggerang, Kamis (12/7/2018). Dalam pidatonya beliau menyebutkan dua nama koperasi dari Indonesia yang menarik perhatiannya. “Kospin Jasa (anak usahanya) sudah melantai di bursa, saya tahu Koperasi Sidogiri juga omzetnya, perputaran uangnya, lebih dari Rp 16 triliun (pertahun),” bisa ditanyakan apa kunci suksesnya ujarnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Kospin Jasa kini sudah menggunakan system online sebagai upaya memajukan anggota dan calon anggotanya dan menyediakan kartu ATM dengan menggandeng Bank Permata. “Adapun, jika Kospin Jasa ini sudah mampu masuk 300 besar koperasi tingkat dunia ini juga mendapatkan tanggapan positif dari Menteri Koperasi dan UMK, syarifudin Hasan saat acara puncak Hari Koperasi Nasional yang digelar di Palangkaraya, belum lama ini. Menteri Koperasi mengatakan saat ini, sebanyak lima koperasi yang layak menjadi pelaku ekonomi kelas dunia dan segera didaftarkan sebagai koperasi kelas dunia versi International Cooperative Alliance (ICA), yaitu 300 GLOBAL Cooperative. “Kita memiliki setidaknya lima koperasi yang memiliki kriteria sebagai koperasi berskala dunia, salah satu diantaranya Kospin Jasa Pekalongan,” Ujar Menteri Syarifuddin Hasan. Pemerintah berupaya mengembangkan sektor ekonomi syariah termasuk koperasi konvensional, seiring dengan perkembangan koperasi & ekonomi syariah di Indonesia. Sementara Bidang Perekonomian RI sedang merumuskan rekomendasi kebijakan untuk antisipasi disahkannya RUU perkoperasian. Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah, kementerian bidang perekonomian, Rudy Salahudin mengatakan, pemerintah dan seluruh stakeholder perlu merumuskan kebijakan yang melindungi koperasi & syariah BMT terhadap lembaga perbankan. Dengan demikian koperasi dapat tumbuh menjadi koperasi skala besar yang mampu bersaing dengan lembaga perbankan dan badan usaha lain, baik disektor jasa keuangan maupun disektor lainnya. Didalam RUU Perkoperasian yang baru, pemerintah telah mengakomodir kebijakan koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah pada Pasal 51 ayat (4) dan (5), yang intinya untuk mendorong perkembangan koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Menurut Rudy, sejauh ini memang belum ada aturan tersebut. Selama ini landasan hukum koperasi syariah hanya diatur dengan peraturan tingkat menteri. Pada tahun 2004 dikeluarkan landasan hukum koperasi syariah yang pertama yaitu keputusan menteri negara koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Dan terakhir diatur dalam peraturan menteri koperasi dan UKM No. 16/Per/M.UKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengungkapkan bahwa ada tiga koperasi yang mengajukan sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tiga koperasi tersebut yaitu Kospin “Kospin Jasa (Pekalongan), Koperasi UGT Sidogiri, dan Kospin Karya Peduli

(Jakarta). Kospin Jasa menjadi penyalur KUR konvensional, Sidogiri sebagai penyalur KUR syariah, sedangkan KSP Karya Peduli sebagai penyalur KUR khusus TKI kita yang ada di luar negeri. Sampai saat ini sudah tercatat ada sekitar 5.000 anggota TKI di koperasi tersebut,” kata Braman di Jakarta, Jumat (13/5/2016). Braman menambahkan persyaratan koperasi untuk menjadi penyalur KUR. Diantaranya ada yang non performing loan (NPL) di bawah 5 persen, portfolio kredit di atas 5 persen, online system dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), dan melakukan kerja sama pembiayaan dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Syarat tambahan untuk koperasi adalah kondisi koperasi itu harus dinyatakan sehat, baik dari sisi solvabilitas dan rentabilitasnya,” papar Braman, selain itu koperasi itu harus menyalurkan kepada anggota koperasi, bukan calon anggota. Misalnya, jumlah anggota 5.000 orang, data itu masuk ke SIKP. Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan koperasi harus tumbuh berkualitas agar kontribusi terhadap pemerataan semakin besar. “Tanpa koperasi berkualitas, pemerataan akan sulit tercapai. Koperasi harus berperan baik,” kata Menteri Puspayoga. Beliau mengatakan, KSPS Sidogiri merupakan salah satu koperasi berkualitas yang turut memberi kontribusi terhadap kesejahteraan anggotanya dan kepentingan nasional. Ia memaparkan koperasi turut memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tercermin dalam PDB koperasi. Melalui reformasi total koperasi, sumbangan PDB koperasi yang hanya 1,71 persen tahun 2014 telah meningkat menjadi 4,48% tahun 2017.

Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga yang dalam RAT KSPS BMT UGT hari ini turut hadir, mengapresiasi kinerja koperasi syariah BMT UGT Sidogiri yang kini memiliki jumlah karyawan 1.422 orang dan kantor layanan 273 tersebut di seluruh Indonesia. Menkop UKM meminta kepada KSPS BMT UGT Sidogiri untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan. Apa yang sudah dilakukan selama ini dengan berbagai program di koperasi syariah perlu ditingkatkan. Apalagi apa yang dilakukan BMT UGT Sidogiri benar benar implementasinya dari amanah konstitusi UUD 1945. “Maka dari itu pengembangan koperasi syariah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri ke depan akan membantu dalam program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan,” tandasnya.

Koperasi BMT UGT Sidogiri kini telah resmi menjadi koperasi primer yang berbadan hukum nasional. Penyerahan Badan Hukum Nasional Koperasi BMT UGT Sidogiri diberikan secara langsung oleh Drs. Setyo Heriyanto, MM Deputy Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia kepada H. Mahmud Ali Zain selaku Ketua Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri pada acara seremonial RAT XIV Tahun Buku 2014 Koperasi BMT UGT Sidogiri Sabtu (21/2) di GOR Kota Pasuruan. “RAT XIV Koperasi BMT UGT Sidogiri kali ini merupakan yang paling istimewa. Sebab, mulai tahun 2015 ini. Koperasi BMT UGT Sidogiri menjadi Koperasi Primer Nasional yang berdiri sejajar dengan koperasi nasional lainnya seperti Kospin Jasa Pekalongan,” kata Drs. Setyo Heriyanto, MM Deputy Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada saat memberikan sambutan sebelum secara resmi menyerahkan badan hukum nasional kepada Koperasi BMT UGT Sidogiri.

Pertumbuhan Koperasi dengan pola syariah cukup mengembirakan. Hingga kini tercatat sudah lebih dari 3000 koperasi syariah berkembang di Indonesia. “Memang dibanding koperasi simpan pinjam konvensional yang sudah mencapai 11 ribuan, tentu jumlah 3000 masih jauh.. Tetapi boleh dikatakan perkembangannya cukup mengembirakan,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo, pada acara Sosialisasi Direktorat Pembiayaan syariah LPDB-KUMKM, bertajuk “Membangun Komitmen dan Kerja Bersama Mengembangkan Keuangan Mikro Syariah Indonesia”, di The Sunan Hotel, Solo, Jateng, Selasa (26/9/2017). Pemerintah berupaya mengembangkan

sektor ekonomi syariah termasuk koperasi, seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perekonomian Bidang Perekonomian RI sedang merumuskan rekomendasi kebijakan untukantisipasi disahkannya RUU Perkoperasian. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah, Kementerian Bidang Perekonomian, Rudy Salahudin mengatakan, pemerintah dan seluruh stakeholder perlu merumuskan kebijakan yang melindungi koperasi syariah dan BMT terhadap lembaga perbankan. Dengan demikian koperasi dapat tumbuh menjadi koperasi skala besar yang mampu bersaing dengan lembaga perbankan dan badan usaha lain baik di sektor jasa keuangan maupun di sektor lainnya. “Rekomendasi kebijakan ini untuk mengantisipasi disahkannya RUU perkoperasian dan sebagai langkah strategis dalam mempercepat persiapan peraturan pelaksanaan kebijakan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah,” ujar Rudy dalam acara forum group Discussion (FUD). Kebijakan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah di Jakarta. Rabu (31/5).

2. Tentu saja dari kedua Koperasi tersebut memiliki efektifitas yang maju, baik itu efektifitas kinerjanya Kospin Jasa Pekalongan, Jawa Tengah dan Koperasi Syariah BMT UGT Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Adapun prosentase kemajuannya berbeda, karena situasi dan kondisi yang berbeda.

Kospin Jasa kini telah mempunyai asset sekitar RP 2,5 Triliun dan memiliki puluhan kantor cabang yang terbesar di wilayah Indonesia. “Sedangkan harapan yang kini masih menjadi impian Kospin Jasa Pekalongan, adalah menembus koperasi tingkat dunia akan terwujud dengan segala kekuatan yang kami miliki,” katanya. Kospin Jasa yang kini dipimpin oleh Andy Arsalan Djunaid masih terus menyalakan harapan dan merengkuh masa depan yang lebih baik dan bermartabat. Ketua Umum Kospin Jasa, Andy Arsalan Djunaid yang kini meneruskan perjuangan orang tuanya, Zaky Arsalan Djunaid terus mencoba memberikan semangat harapan itu kepada pengurus, anggota, dan manajemen. Ia mengatakan untuk mengembangkan usaha ini, Kospin Jasa dalam waktu dekat juga akan membuka kantor cabang di Sulawesi Selatan, Kalimantan, Palembang, dan Aceh.

Pada layanan Konvensional asset koperasi tumbuh 4,53% year on year (yoy) dari Rp 6,4 triliun menjadi Rp 6,69 triliun sepanjang tahun 2018. Adapun simpanan tumbuh 5,41% yoy menjadi Rp 1,48 triliun dari posisi 2017 senilai Rp 1,56 triliun. Sedangkan Pinjaman tumbuh 0,77% yoy dari Rp. 3,91 triliun menjadi Rp. 3,94 triliun. Sedangkan layanan kinerja syariah terdiri dari asset mencapai Rp. 1,61 triliun naik 5,23% yoy dari pencapaian tahun 2017 senilai Rp 1,53% triliun. Simpanan pada tahun 2018 mencapai Rp 1,56 triliun atau naik 5,41% yoy dari Rp. 1,48 triliun di tahun 2017. Pembiayaan syariah tumbuh 5,3 % dari Rp 1,51 triliun menjadi Rp. 1,59 triliun. “Meski target secara umum tidak tercapai, kami berhasil mencapai Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih tinggi untuk tahun 2018. Pada tahun 2017, SHU yang dibagikan sebesar 13%. Sedangkan 2018 menjadi 17,8% atau Rp. 35 miliar. Naiknya SHU tersebut didorong berbagai efisiensi biaya yang diterapkan koperasi,” papar Andy. Dirinya optimis kinerja keuangan Kospin Jasa tahun 2019 akan mengalami peningkatan. Hanya saja pertumbuhan akan terjadi jika Pilpres dan Pemilu tahun ini berjalan lancar. “Kami menargetkan asset kumulatif Kospin Jasa tumbuh menjadi Rp. 9,3 triliun, ditengah situasi ekonomi yang tidak menentu, partisipasi dan loyalitas anggota menjadi sumber ketahanan dan eksistensi Kospin Jasa,” kata Andy.

Koperasi ini memiliki kantor pusat di Pekalongan, Jawa Tengah. Sedangkan koperasi Sidogiri bernama resmi Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Unit Gabungan Terpadu Sidogiri yang berdiri di tahun 2000, koperasi ini didirikan oleh beberapa orang yang terlibat dikegiatan urusan guru tugas pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Tengah Karena kontribusi koperasi ke PDB 2017 capai 4,48 persen, setara Rp 452 triliun. Presiden Jokowi

juga nama nama koperasi diluar negri yang layak dicontoh di Indonesia. Salah satunya adalah Fonterra, sebuah koperasi di Selandia Baru. Fonterra adalah koperasi produsen susu yang sahamnya dimiliki bersama oleh 10.500 peternak di Selandia baru. Koperasi ini tercatat memiliki omzet 17,2 miliar dolar Selandia Baru atau sekitar Rp 165 triliun pertahun. Koperasi ini juga berhasil menjangkau 30 persendari pasar susu dunia. Koperasi lainnya yang patut dicontoh dari luar negri adalah Ocean Spray. Koperasi dari Amerika Serikat tersebut berhasil mengembangkan buah cranberry menjadi produk ekspor unggulan. Produk koperasi ini merambah pasar dunia sehingga omzetnya mencapai triulan rupiah. Contoh contoh seperti itu banyak sekali di seluruh dunia. Koperasi memang harus menjadi pendorong inovasi industri, jelasnya.

Bisnis Koperasi tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Kini koperasi bisa meraup asset 7,03 triliun dan volume usaha Rp 4,6 triliun. Hal tersebut ditemukan oleh pengamat koperasi Irsyad Muchtar dalam buku 100 Koperasi Besar Indonesia 2017. Irsyad menggunakan beberapa kriteria dalam menentukan 100 koperasi besar Indonesia. Pertama berdasarkan bangunan fisik koperasi, manajemen, penerapan, teknologi dan informatika, CSR, serta mengacu kepada peraturan Menteri Koperasi Nomor 7 tahun 2011. Dalam peraturan tersebut dikatakan kriteria koperasi besar adalah dia memiliki asset minimal Rp 10 miliar, omzet minimal Rp 50 miliar, serta setidaknya punya 1000 anggota. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia sudah mencapai 150.223 unit usaha. Dari jumlah tersebut 1,5 persennya merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Dan tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit engan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp. 968 miliar dan modal luar Rp. 3,9 triliun dengan volume usaha mencapai Rp. 5,2 triliun. Ketika menjadi salah satu pembicara dalam Dialog Tingkat Tinggi dengan Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah, Braman Setyo, Deputy Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM mengatakan saat ini perkembangan koperasi pembiayaan syariah sangat potensial kinerjanya. Dan saat ini sangat baik, berkualitas dari sisi kesehatan koperasi, SDM dan IT.

Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Siodogiri (BMT UGT Sidogiri) Sholeh Wafi mengungkapkan, koperasi tersebut mencatatkan yang signifikan dari sisi asset selain itu, omzet penjualan di koperasi tercatat positif. Total asset yang dimiliki BMT UGT Sidogiri pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp 1,8 triliun. Ditahun berikutnya, asset yang dimiliki koperasi simpan pinjam syariah tersebut sebesar Rp. 2,2 triliun. Sementara, omzet sebesar Rp 16,8 triliun selama 2016. Namun, untuk 2017, Sholeh belum bisa menjelaskan, karena biasanya laporan baru disusun di awal tahun berikutnya. “Omzet ditahun 2016 itu tercatat Rp 16.891.608.608.532,- Kalau tahun ini belum tahu karena belum disusun laporannya,” kata Sholeh saat ditemui Republika.co.id di Kantor Pusat BMT UGT Sidogiri, Jalan Sidogiri Barat, Kraton, Pasuruan, Jatim, akhir pekan kemarin. Saat ini, Kata Sholeh, BMT UGT Sidigiri telah memiliki 278 kantor cabang yang tersebar di sepuluh provinsi di Indonesia. Provinsi yang dimaksud adalah Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Riau, dan Lampung.

BMT UGT Sidogiri saat ini memiliki anggota sebanyak 16.010 orang. Masyarakat yang mempercayakan unuk menyimpan tabungannya di BMT UGT Sidogiri sebanyak 783.418 orang, dan peminjam sebanyak 137.981 orang. Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri terus memacu penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi). Sidogiri menyalurkan Kredit UMi sebsar Rp 50 miliar kepada 11.104 orang anggotanya. Adapun plafon maksimal kredit Umi sebesar Rp 10 juta. Ketua KSPS BMT UGT Sidogiri, K.H. Mahmud Ali Zein mengatakan koperasi adalah wujud ekonomi keumatan atau ekonomi kerakyatan yang berorientasi kepentingan orang banyak. Manfaat gerakan koperasi telah

banyak dirasakan masyarakat. Ia menjelaskan menghadapi peluang dan tantangan, KSPS Sidogiri terus melakukan pembenahan baik dalam bidang manajemen maupun teknologi informasi. “Dalam laporan keuangan KSPS Sidogiri tahun buku 2018, disampaikan koperasi terus mengalami pertumbuhan jumlah anggota mencapai 18.060 orang dengan nilai asset Rp. 2,25 triliun,” ujar Ali

Peringkat ke-1 diduduki oleh Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa Pekalongan yang memiliki asset hingga lebih dari Rp 7 triliun dan volume usaha mencapai Rp 4,6 triliun. Peringkat ke-2 ditempati oleh Koperasi Kredit (Kopdit) Lantang Tipo Sanggau dengan asset Rp 2,6 triliun dan volume usaha Rp. 1,8 triliun. Peringkat ke-3 diduduki oleh Kisel Jakarta dengan asset Rp 1,09 triliun dan volume usaha Rp. 5,7 triliun. Peringkat ke-4 ditempati oleh Koperasi BMT UGT Sidogiri yang memiliki asset Rp 2,2 triliun dan volume usaha Rp 2,05 triliun. Sedangkan peringkat ke-5 diduduki oleh Kopdit Pancur Kasih Pontianak yang memiliki asset Rp 2,01 triliun dengan volume usaha Rp 1,3 triliun. Koperasi syariah BMT UGT Sidogiri mampu membukukan asset sebesar Rp. 1,8 triliun pada tahun 2015. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam Syariah (PSPS) BMT UGT Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, tahun ini sangat fantastis disbanding tahun sebelumnya. Koperasi Syariah yang berdiri pada tahun 2000 tersebut mampu membukukan asset sebesar Rp 1,8 triliun pada tahun 2015, meningkat 25 % dibandingkan pada tahun 2014 sebesar Rp 1,5 triliun. Ketua KSPS BMT UGT Sidogiri, KH. Mahmud Ali Zain mengemukakan, perkembangan dari BMT UGT Sidogiri tidak lepas dari partisipasi para anggota yang saat ini berjumlah 12.901 anggota. Terkait peningkatan asset, selama ini dipengaruhi banyak faktor, diantaranya simpanan sukarela pada 2015 sebesar 25 % dan dana pinjaman dari bank sebesar 42%. Sementara sisa hasil usaha (SHU) juga meningkat 5 % pada 2015 mencapai Rp 16,8 triliun dibandingkan 2014 sebesar Rp 16,04 triliun. “Dengan kinerja koperasi syariah ini kami berharap kedepan akan terus meningkat sehingga keberadaan BMT UGT Sidogiri bermanfaat bagi umat,” ujar Mahmud dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sindonews, Sabtu (20/2/2016).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UGT Sidogiri Indonesia di Pasuruan, menargetkan asset untuk rencana kerja jangka menengah (2018-2020) mencapai Rp 5 triliun. Sedangkan untuk tahun buku 2017 asset BMT Sidogiri mencapai Rp 2,4 triliun. Ketua Pengurus UGT Sidogiri Indonesia, KH. Mahmud Ali Zain mengatakan, untuk mencapai target yang kami lakukan,” katanya. BMT UGT Sidogiri Indonesia telah memiliki jaringan berupa kantor cabang di seluruh provinsi dan satu di mancanegara yakni Malaysia. Tahun 2017 memiliki jumlah anggota 16.647 anggota dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 berjumlah 16.010 anggota. Dalam operasionalnya BMT UGT Sidogiri memberikan pelayanan berupa simpanan, pembiayaan dan layanan multi jasa.

KESIMPULAN

Presiden RI Joko Widodo memuji Koperasi Kospin Jasa Pekalongan dan BMT Syariah Sidogiri Pasuruan yang beromzet triliunan sebagai contoh yang patut diikuti. Koperasi-koperasi ini membawa nama baik Indonesia di dalam dan luar negeri. Kospin Jasa, misalnya, telah mengadopsi sistem online dan menyediakan kartu ATM bekerja sama dengan Bank Permata untuk memudahkan anggotanya.

Menteri Koperasi Syarifuddin Hasan menyatakan bahwa ada lima koperasi Indonesia yang layak menjadi pelaku ekonomi kelas dunia dan akan didaftarkan ke International Cooperative Alliance (ICA) 300 GLOBAL Cooperative. Pemerintah mendukung pengembangan sektor ekonomi syariah dan koperasi konvensional, seiring dengan

disusunnya rekomendasi kebijakan untuk RUU Perkoperasian. RUU ini mengakomodir koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah pada Pasal 51 ayat (4) dan (5).

Kospin Jasa Pekalongan memiliki aset sekitar Rp 2,5 triliun dan puluhan kantor cabang di seluruh Indonesia. Meski target umum tidak tercapai, Kospin Jasa berhasil meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi 17,8% atau Rp 35 miliar pada tahun 2018. Andy Arsalan Djunaid, pemimpin Kospin Jasa, optimis kinerja keuangan koperasi ini akan meningkat pada tahun 2019 dengan target aset kumulatif Rp 9,3 triliun.

Koperasi BMT UGT Sidogiri, yang berdiri tahun 2000, telah mencatat pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2015, asetnya mencapai Rp 1,8 triliun dan meningkat menjadi Rp 2,2 triliun pada tahun 2016. BMT UGT Sidogiri menargetkan aset Rp 5 triliun untuk rencana kerja jangka menengah 2018-2020. Koperasi ini juga aktif dalam penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) dan memiliki cabang di seluruh provinsi Indonesia serta satu di Malaysia.

Menurut pengamat koperasi Irsyad Muchtar, koperasi-koperasi di Indonesia menunjukkan perkembangan pesat. BMT UGT Sidogiri berada di peringkat ke-4 koperasi besar di Indonesia, dengan aset Rp 2,2 triliun dan volume usaha Rp 2,05 triliun. Koperasi ini diharapkan terus berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

REFERENCES

- Astriani, E. M., Sulastyawati, D., & Saputra, A. D. (2021). *Motivasi Karyawan Bekerja di Koperasi KSP Artha Mulia Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Darsono, E. (2022). Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1), 43–53.
- Harisah, H., & Arifkan, M. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 172–185.
- Haryadi, Y. (2020). *Peran Koperasi Dalam Kebangkitan Ekonomi Umat*. tre Media Digital.
- Indriani, Y. (2020). Koperasi Sebagai Wahana Pembelajaran, Serta Pembentukan Perilaku Berkoperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Mahasiswa Kota Bandung). *KOPERASI SEBAGAI WAHANA PEMBELAJARAN, SERTA PEMBENTUKAN PERILAKU BERKOPERASI*.
- Nursaman, N., & Sisdianto, E. (2020). Prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Dunia Bisnis Perbankan Syariah Berbasis Al-Qur'an. *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(2), 111–130.
- Ompusunggu, D. P., Sutrisno, D. R. I., & Hukom, A. (2023). Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 4, 689–696.
- Pasca, Y. D. (2018). Analisis Peran Manajemen Koperasi Dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kpri Mitra SMA Negeri 1 Maja Kabupaten Majalengka. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(6), 111–122.
- Sejatera, S., & SAPUTRA, R. E. (2018). pengaruh pendapatan, tingkat religiusitas, sikap, dan lingkungan sosial terhadap ketepatan waktu dalam “recurring payment”: studi kasus anggota.

- Syam, M. I., & Sastrawati, N. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Partisipasi Perempuan di Organisasi Ekstrakurikuler Futsal; Studi Kasus di SMAN 14 Gowa. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74–97.